

**KERJASAMA PEMERINTAH KOTA SEMARANG (DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA) DENGAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
PANDANARAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA
WISATA KANDRI SEMARANG**

Oleh:

Ika Dewani
(14010113120007)

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Kandri tourism village is one of the leading tourist village in Semarang City which is now continuously developed to be an economic support in the region, especially in Kandri Village. In the development of this Kandri tourism village, Semarang City Government through the Department of Culture and Tourism of Semarang City cooperates with Pandanaran Tourism Awareness Group (Pokdarwis) Pandanaran in terms of training and coaching. This research analyzes the cooperation between Semarang City Government (Culture and Tourism Office) and Pandanaran Tourism Awareness Group (Pokdarwis) in community empowerment through development of Kandri tourism village starting from cooperation form, cooperation implementation, result of cooperation and benefit from this cooperation. In conducting this research, researches use qualitative research methods that will produce descriptive data. This research was conducted in Kelurahan Kandri. Data obtained by researchers from documents, observations and interviews. From the results of this study, found a form of cooperation undertaken by the Department of Culture and Tourism Semarang City with Aware Group (Pokdarwis) Pandanaran is in the form of training and fostering the development of tourism conscious groups, tour guide instructors, cultural development Kandri, how to process and package/ linkage Tourism products, breeding of fish seeds and training to arrange rooms for tourist (homestay). Implementation of cooperation using informal communication such as discussion and in this cooperation there is no MOU or work agreement. The result of this cooperation is the capacity of Human Resources (HR) increased, the formation of tour packages, and the number of tourist visits also increased. But

in the implementation of community empowerment cooperation through the development of this tourist village there are obstacles that is still difficult to change mindset Kandri village people who formerly as farmers and now have to turn into business actors in the field of tourism.

Key Words: Cooperation, Empowerment, Tourism Village Development

I PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan alternatif pemasukan bagi pendapatan daerah maupun bagi devisa negara, bahkan bagi negara-negara maju sekalipun pariwisata serius untuk dikembangkan. Terkait dengan hal itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1990 menyatakan bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Dalam pengembangan potensi wisata di Kota Semarang, Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 556/407/Tanggal 21 Desember 2012 diputuskan bahwa Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai Desa Wisata berbasis Daya Tarik Alam dan berbasis Daya Tarik Seni Budaya. Pariwisata pedesaan tentunya berbeda dengan pariwisata perkotaan, baik dalam hal objek lokasi, fungsi, skala maupun karakternya. Hal ini tentunya membawa konsekuensi terhadap perencanaan dan pengembangannya. Aspek-aspek seperti peranan desa wisata dalam spesialisasi lokasi dan ketersediaan atraksi dan fasilitas layak mendapatkan perhatian dalam pengembangan desa-desa wisata yang diharapkan maupun mendukung diversifikasi perdesaan. Pariwisata memiliki peluang besar menjadi media yang aplikatif dan efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Pendekatan pariwisata berbasis masyarakat dapat membuka jalan lebih lebar bagi kelompok masyarakat miskin untuk ikut menikmati peluang dan hasil pengembangan pariwisata (Damanik, 2005 : 26).

Pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks meliputi industri-industri seperti industri kerajinan tangan, industri cenderamata, penginapan dan transportasi. Sebagai industri jasa yang digolongkan sebagai industri ketiga, pariwisata cukup berperan penting dalam menetapkan kebijaksanaan mengenai kesempatan kerja, dengan alasan

semakin mendesaknya tuntutan akan kesempatan kerja yang tetap sehubungan dengan selalu meningkatnya wisata di masa yang akan datang. Kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh ekspor non-migas yang menurun, impor yang naik, dan pembangunan ekonomi yang timpang.

Desa Kandri berada di kecamatan Gunungpati Kota Semarang dan merupakan desa yang masih sangat alami. Desa Kandri mempunyai luas wilayah 245,490 ha dan terbagi menjadi 4 RW dan total ada 26 jumlah RT. Dari keempat RW tersebut mempunyai ciri khasnya masing-masing. Di RW I ada yang dinamakan Desa Edukasi yang dijadikan sebagai Kampung Inggris dan pendidikan alam. Di RW II sebagai arena perkebunan yang dilengkapi dengan aneka buah, dimana juga dijadikan sebagai tempat untuk outbond. Kemudian di RW III sebagai kawasan budaya yang sebelumnya untuk pementasan kesenian berupa wayang kulit, wayang suket, jatilan, watu lumpang dan kesenian lesung. Sementara di RW IV banyak dihuni oleh masyarakat yang menjajakan makanan khas berpotensi sebagai wisata kuliner, meliputi dodol tape, kripik kulit pisang dan cake tape.

Dalam paradigma baru pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat tersebut menuntut perubahan pendekatan dari pendekatan top down yang selama ini mendominasi proses pembangunan menjadi bottom up. Pendekatan ini sangat sesuai dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat dan merupakan hal pokok yang harus dijalankan. Melalui pendekatan ini diharapkan pembangunan kepariwisataan menjadi dapat lebih diterima dan mampu memberikan nilai manfaat yang tinggi kepada masyarakat sehingga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab sebagai pelaku dan penentu pembangunan kepariwisataan dalam skala lokal. Pendekatan pembangunan pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari produk wisata dan pemahaman bahwa produk wisata merupakan proses rekayasa sosial masyarakat merupakan esensi dari pembangunan yang berbasis pada komunitas atau masyarakat (*community based development*).

Konsep pembangunan ini merupakan salah satu pendekatan yang memiliki nilai strategis. Di satu pihak pendekatan ini diyakini mampu menciptakan produk wisata lokal sebagai modal dasar dalam perencanaan dan pemasaran produk, dan dilain pihak akan dapat menciptakan ketahanan dan kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana serta aksesibilitas menjadi faktor yang penting dalam pengembangan pariwisata. Semakin memadai fasilitas dan sarana

prasarana yang ada disuatu objek pariwisata akan berdampak pada semakin tingginya tingkat kunjungan wisatawan. Dengan tingginya tingkat kunjungan wisatawan akan berdampak pada semakin tingginya pendapatan dari objek pariwisata (Salah, 2003 : 16).

Hal ini berbeda dengan Desa Wisata Kandri sendiri, dimana masih banyak permasalahan dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai. Daya dukung infrastruktur lingkungan yang belum optimal di Kandri seperti menata, merapikan dan menanam tanaman di sepanjang objek desa wisata serta penerangan jalan. Infrastruktur jalan menuju ke Desa Wisata Kandri yang belum optimal, berkurangnya lahan pertanian, minimnya perhatian dan penanganan terhadap potensi lokal serta sumber daya manusia (SDM) dan belum optimalnya pemberdayaan potensi dan obyek daya tarik wisata Desa Kandri.

Objek pariwisata dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi, akan berdampak pada semakin tinggi minat wisatawan untuk melakukan kunjungan pada objek wisata tersebut. Tingkat aksesibilitas ini berupa aksesibilitas jalan maupun informasi. Kemudahan dalam mengakses jalan menuju objek pariwisata adalah faktor terpenting dalam rangka pengembangan pariwisata. Keberadaan jalan yang memadai akan mempermudah kunjungan maupun mobilitas wisatawan. Dengan tidak mengesampingkan kemudahan akses terhadap informasi objek pariwisata. Kemudahan dalam mengakses informasi berkaitan dengan objek wisata merupakan faktor pemicu dalam minat kunjungan wisatawan.

Berdasarkan *framework tourism marketing plan* Kelompok Sadar Wisata Pandanaran (Pokdarwis Pandanaran) dengan Pemerintah Kota Semarang (Dinas Budaya dan Pariwisata), diidentifikasi bahwa pengembangan Desa Wisata Kandri ini untuk lebih meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah khususnya Kota Semarang, Proses terbentuknya Kandri menjadi satu desa wisata bermula dari keinginan yang kuat dari masyarakat desa tersebut. Masyarakat rutin melakukan forum-forum pertemuan seperti temu RT, RW dan pengajian. Dari pertemuan tersebut masyarakat berinisiatif untuk menjadikan Kandri menjadi sebuah desa wisata dengan menggali seluruh potensi yang ada, menyusun rencana pengembangan, menata lingkungan, membuka pola pikir, dan tindak studi banding melakukan pelatihan (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang).

Konsep strategi pengembangan desa wisata Kandri yaitu terciptanya pelayanan yang memuaskan, bernilai jual dan berdaya saing dengan daya tarik berupa produk alam, seni adat budaya, minat khusus, ,makanan – minuman khas desa yang berupaya

memperhatikan keinginan, kebutuhan serta harapan wisatawan. Kelurahan Kandri, salah satu desa wisata di Kota Semarang yang terus meningkatkan promosi untuk menyedot wisatawan. Namun demikian, kesiapan desa wisata menyambut wisatawan domestik maupun asing, masih terkendala belum seluruhnya didukung kondisi infrastruktur jalan dan sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai. Masih perlunya perhatian dari Pemerintah Kota untuk didukung sepenuhnya, agar desa wisata Kandri tersebut bisa lebih dikembangkan dan terkelola dengan baik. Dari paparan di atas sangat menarik untuk mengetahui keberhasilan program kerjasama yang dilaksanakan, program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan langkah-langkah yang seharusnya diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandanaran.

II Metoda

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata Kandri adalah di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dan Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Dalam penelitian ini data diperoleh dari sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandanaran, Kepala Lurah Desa Kandri, dan Masyarakat Desa Wisata Kandri. Selain data primer, penelitian ini juga diperoleh dari data sekunder yang berasal dari buku yang menyangkut dengan tema penulis, jurnal-jurnal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian penulis, dokumen yang diperlukan yang berasal dari pemerintah kota dan sebagainya.

III KERJASAMA PEMERINTAH KOTA SEMARANG (DINAS BUDAYA PARIWISATA) DENGAN POKDARWIS PANDANARAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA KANDRI

1. Tujuan Kerjasama

Kerjasama yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata Kandri bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat Kandri yang dulunya bermata pencaharian petani

menjadi pelaku usaha bidang pariwisata untuk mengembangkan wilayah/ desa dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

Pelatihan dan pembinaan yang paling sering dilakukan untuk megembangkan Desa Wisata Kandri adalah pelatihan pemandu wisata, pengembangan kelompok sadar wisata, penguatan organisasi, cara mengemas/ *packaging* agar produk wisata lebih menarik dan pelatihan untuk pembibitan benih-benih ikan. Selain pembinaan dan pelatihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga mempromosikan desa wisata Kandri melalui kerjasama dengan Garuda Indonesia, AIESEC UNDIP Semarang dalam bidang seni, budaya dan bahasa, event yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan media sosial seperti instagram.

2. Pelaksanaan Kerjasama

Kerjasama yang dilakukan tidak lepas dari konsep kerjasama yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh dua pihak dengan hak dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Kerjasama ini berasal dari inisiatif masyarakat dengan menggandeng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai pengelola dalam kerjasama dan untuk mencapai keberhasilan tersebut dilakukan melalui diskusi-diskusi dengan pihak yang terlibat dalam kerjasama.

Pihak yang terlibat dan tugas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama secara garis besar yakni:

1. Pemerintah Kota Semarang melalui jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang bertugas mengembangkan sumber daya manusia, memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan dan pembinaan serta kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Wisata Kandri.
2. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandanaran bertugas sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya pemahaman kepariwisataan di masyarakat, meningkatkan peran dan partisipasi dalam pembangunan pariwisata, dan mensukseskan pembangunan kepariwisataan di wilayah/ desa wisatanya.

Dalam menjalankan program kerjasama, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menggunakan Oemah Tani sebagai tempat pelaksanaan pembinaan dan pelatihan serta sekaligus tempat pementasan seni budaya Kandri di acara event-event.

Dalam pelaksanaan kerjasama pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata ini masing-masing pihak yang terlibat mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai pelaku dari pihak pemerintah daerah mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas yang diperlukan agar terlaksananya kerjasama pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata baik dalam pelatihan maupun pembinaan, mengkoordinasi semua pelaku yang terlibat dalam kerjasama agar kerjasama yang dilakukan berjalan sesuai harapan. Selain itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga berhak untuk menentukan partner kerja yang kompeten untuk diajak kerjasama, meminta output dari kerjasama yang dilakukan, meminta data dari peserta pelatihan terkait pengembangan desa wisata yang dijalankan.
- b. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandanaran mempunyai kewajiban mengisi form-form laporan dan data yang dibutuhkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang serta mendukung kegiatan-kegiatan di sektor pariwisata Kota Semarang yang melibatkan Pokdarwis Pandanaran. Selain itu dari Pokdarwis Pandanaran juga berhak untuk mengembangkan desa wisata melalui kerjasama Pemerintah Kota Semarang (Disbudpar) agar mendatangkan banyak wisatawan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa wisata.

3. Kesepakatan Kerjasama

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan Pokdarwis Pandanaran pada dasarnya menggunakan model kerjasama tanpa MOU atau MOA. Kerjasama yang dilakukan hanya berupa jaringan kerja (*networking*) atau berupa keterlibatan satu sama lain antara Pemerintah Kota Semarang (Disbudpar) dan Pokdarwis Pandanaran dalam pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata yang berkaitan dengan masing-masing tugas yang dijalankan.

Karena tidak adanya landasan hukum yang mengikat kerjasama ini maka yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah keterbatasan terutama dalam hal biaya. Biaya yang hampir sepenuhnya diperoleh dari pemerintah ini menjadikan kerjasama yang dilakukan ini sangat bergantung pada pemerintah daerah. Selama ini kerjasama yang dilakukan ini yang lebih berperan besar adalah Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Semarang karena memang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata ini termasuk dalam program kerja dinas. Selain untuk

mengoptimalkan kerjasama yang dilakukan, landasan hukum ini juga perlu untuk mengikat pihak yang terlibat dalam kerjasama ini baik dalam hal pelatihan maupun dalam hal pembinaan. Landasan hukum ini juga perlu untuk meminimalisir resiko dalam kerjasama seperti salah satu pihak kerjasama melanggar suatu perjanjian, maka pihak tersebut akan jelas sanksi hukumnya.

4. Hasil Yang Dicapai Dari Kerjasama

Dari kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandanaran, hasil yang telah dicapai sejauh ini adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat

Dengan dilakukannya pelatihan-pelatihan dan pembinaan SDM, sedikit demi sedikit kemampuan masyarakat mulai bergeser dari yang dulunya bertani menjadi pelaku usaha dibidang pariwisata, menjadi masyarakat terampil dan kreatifitas dalam membuat variasi produk wisata, event seni budaya dan sebagainya yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan usaha mereka serta dapat menambah nilai produksi wisata mereka. Masyarakat juga diarahkan untuk bergerak bersama-sama dalam mencapai tujuan dan meningkatkan nilai tambah dalam hal produk wisata yang berpengaruh terhadap pendapatan para pengusaha dibidang pariwisata, salah satu produk wisata kuliner desa Kandri yang sudah berhasil dikembangkan.

2. Terbentuknya Paket-Paket Wisata

Dengan dilakukannya kerjasama pengembangan Desa Wisata dalam pemberdayaan masyarakat , memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengembangkan wilayah mereka dengan potensi wisata alam dan buatan yang mereka miliki. Desa Kandri memiliki paket-paket wisata yang dapat dinikmati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Kandri seperti wisata minat khusus yakni proses penggarapan sawah (mananam padi, membajak, menggaru, memandikan sapi/kerbau), menjelajah desa melewati area persawahan, kebun buah, kebun sayur, kolam, wisata outbond dan kesenian khas Desa Kandri.

3. Jumlah Wisatawan Meningkat

Desa wisata Kandri mulai dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat luas baik dari dalam kota atau daerah sendiri, luar daerah bahkan sampai nasional. Adanya fasilitas dari pihak-pihak yang berkerjasama dalam aspek promosi diantaranya event-event seni budaya, dan pameran produk wisata desa Kandri

membawa dampak positif bagi penambahan jumlah wisatawan yang datang ke desa wisata Kandri.

Beberapa pengaruh kepada masyarakat dalam bidang ekonomi, dengan adanya kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandanaran meliputi :

a. Membuka lapangan pekerjaan

Pada aspek ekonomi, adanya perkembangan aktivitas pariwisata di dalam kawasan mengakibatkan perubahan pada tingkat pendapatan masyarakat yang cukup signifikan. Pada kesempatan kerja dan berusaha juga mengalami peningkatan. Hal ini karena salah satu dampak dari kegiatan pariwisata adalah mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru. Membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal di bidang pariwisata seperti: pemandu wisata, pengusaha kuliner dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat bahwa berkurangnya pengangguran di wilayah Desa Kandri, jenis pekerjaan masyarakat mempunyai variasi yang lebih banyak, yang rata-rata mereka mulai bekerja menjadi pemandu wisata maupun pedagang di sekitar area wisata. Mereka tidak lagi bergantung pada sektor pertanian yang mengandalkan musim.

b. Dibangunnya fasilitas dan infrastruktur

Dibangunnya fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik demi kenyamanan para wisatawan yang juga secara langsung dan tidak langsung bisa dipergunakan oleh penduduk lokal pula. Hal ini dapat dilihat dengan diperbaikinya jalan akses menuju Desa Wisata Kandri, yaitu dengan aspal hot mix setebal 10 cm, selain itu sarana masjid yang dulunya sepi, sekarang ramai karena banyak pengunjung yang menggunakannya. Sarana MCK yang semakin layak dan memadai dengan banyaknya pengunjung. Akibat adanya manfaat aktivitas pariwisata terhadap kehidupan ekonomi ternyata dapat meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kawasan wisata.

c. Mendorong seseorang untuk berwiraswasta/ wirausaha

Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pedagang kerajinan, pedagang makanan, pedagang jasa-jasa lainnya, maupun pemasok bahan makanan, dan lain-lain. Banyak masyarakat di kasawasan Desa Wisata Kandri yang tidak dapat terlibat langsung dalam kegiatan atau aktivitas wisata, memilih untuk menjadi pedagang di sekitar daerah wisata. Selain itu wisatawan yang pergi berwisata bersama keluarganya memerlukan kamar yang besar dan makanan yang lebih banyak,

tentunya hal ini memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menyediakan jasa atau layanan penginapan. Hal ini dimanfaatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandanaran dalam hal penyediaan penginapan, yaitu dengan penyediaan jasa akomodasi berupa homestay dengan menggunakan rumah warga yang dirasa cukup besar.

5. Hambatan Dalam Kerjasama

Dalam pengembangan suatu objek wisata yang berada di kawasan desa wisata, yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandanaran tentunya ada saja kendala maupun hambatannya, misalnya saja dari aspek lingkungan internal yang datang dari dalam atau kultur masyarakatnya seperti mengubah mindset/ pola pikir masyarakat Kelurahan Kandri yang dahulunya sebagai petani sekarang harus beralih menjadi pelaku usaha di bidang pariwisata dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perubahan yang ada di lingkungan mereka. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandanaran untuk terus memberdayakan masyarakat melalui pengembangan objek wisata yang ada dan menunjukkan prestasinya.

IV KESIMPULAN

Kerjasama pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata Kandri oleh Pemerintah Kota Semarang (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandanaran ini telah mampu memberikan kontribusi yang positif yaitu memberikan pembekalan kepada masyarakat Kandri yang bermatapencapaian di bidang pariwisata seperti pembinaan dan pelatihan pengembangan kelompok sadar wisata, instruktur pemandu wisata, cara mengolah dan mengemas/ packaging produk wisata, pengembangan kesenian budaya Kandri, pembibitan benih-benih ikan dan pelatihan menata kamar tempat tinggal sementara (homestay) untuk wisatawan.

Selain pembinaan dan pelatihan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga membantu promosi desa wisata Kandri melalui kerjasama dengan Garuda Indonesia, AIESEC UNDIP Semarang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta melalui event yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan media sosial seperti instagram.

Hasil dari kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan Pokdarwis Pandanaran adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) meningkat, terbentuknya paket-paket wisata dan jumlah kunjungan wisatawan juga meningkat. Beberapa manfaat yang juga dirasakan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah terbukanya lapangan pekerjaan, dibangunnya fasilitas dan infrastruktur serta mendorong seseorang berwiraswasta.

Pola pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandanaran adalah komunikasi informal seperti diskusi. Kerjasama ini berasal dari inisiatif masyarakat Kelurahan Kandri dan dalam pelaksanaan kerjasama belum ada kesepakatan kerja atau MOU.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa wisata Kandri ini sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat setempat mulai dari pembentukan hingga pelaksanaan. Masyarakat dilatih untuk berinteraksi dengan orang lain dan dengan banyaknya wisatawan yang datang akan memberikan penghasilan pendapatan tersendiri bagi masyarakat.

Dalam kerjasama pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata Kandri oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandanaran tentu ada kendala maupun hambatan yakni masih sulit untuk mengubah mindset/ pola pikir masyarakat Kelurahan Kandri yang dahulunya sebagai petani dan sekarang harus beralih menjadi pelaku usaha dibidang pariwisata. Selain faktor penghambat, ada pula faktor pendukung yang memotivasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandanaran untuk terus berjuang dalam memberdayakan masyarakat melalui pengembangan desa wisata Kandri yakni kesamaan Visi dan Misi tujuan kerjasama, sikap gotong royong yang masih kental, tradisi dan budaya yang masih bertahan, dan perkembangan ekonomi yang dirasakan masyarakat Kelurahan Kandri.

Daftar Pustaka

Buku :

Damanik, Janianton. 2005. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata*. Yogyakarta: Kepel Press.

Salah, Wahab. 2003. *Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja*. Jakarta: PT Pertja

Jurnal :

Widiyanto, Dodi. 2008. *Pengembangan Pariwisata Perdesaan Suatu Usulan Strategi Bagi Desa Wisata Ketingan*. *Jurnal Bumi Lestari*, Vol.8 No. 2 (Agustus): 205-210. Dalam <http://ojs.unud.ac.id/> Diunduh pada 9 September pukul 08.00 WIB

Zakaria, Faris dan Ritma Dewi Suprihardjo. 2014. *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*. *Jurnal Teknik Pomits* Vol. 3, No.2 (September): 1-5. Dalam <http://digilib.its.ac.id/> Diunduh pada 9 September pukul 13.15 WIB

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan. Sekretariat Negara.Jakarta.

Internet :

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2001. *Pembangunan Kawasan Unggulan Minat Khusus Petualangan di Kalimantan Timur*. Jakarta: Direktorat Jendral Pengembangan Produk Pariwisata. Dalam <http://samarinda.bpk.go.id/> Diunduh pada tanggal 5 April pukul 20.15 WIB

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2008. *Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Sektor Kebudayaan dan Pariwisata (PNPM) Pariwisata*. Dalam <http://www.kemenpar.go.id/> Diunduh pada tanggal 3 April pukul 13.30 WIB

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.56/UM.303/MKP/2008 tentang Pedoman*

Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Desa Wisata. Dalam
<http://kemenpar.go.id/> Diunduh pada tanggal 25 Maret pukul 18.30 WIB